

BAB II

KERJA SAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pada bab dua dalam penelitian ini menjelaskan tentang Kemiliteran Indonesia dan China, kerja sama TNI dengan militer China, dalam bab ini juga akan dipaparkan tentang kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

A. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam perkembangannya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu Tentara Republik Indonesia sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). (Fotaleno, 2017)

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan pada tahun 1945-1949, TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali

menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. (Isriana, 2017)

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi NKRI telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat. Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI). Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di dalam lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum di tahun 1955.

Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya. Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun '60an. (Purnomo, 2017)

Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. (RMOL.CO, 2017) Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya. Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang syah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam situasi yang serba chaos itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen. Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Disisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD). (2017)

TNI secara resmi lahir sejak 5 Oktober 1945 untuk membela kemerdekaan Republik yang telah diproklamirkan 17 Agustus 1945 (Angel Rebasa, 2002). Peran, Fungsi dan Tugas TNI mengalami perubahan sesuai dengan UU No.34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara dalam bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih

terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. (MABES TNI, 2017)

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI dibagi dua yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI sampai saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi nasional. (MABES TNI, 2017)

TNI tetap pada komitmennya menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik dimasa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, sejak tahun 1998 sebenarnya secara internal TNI telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan, antara lain : Pertama, merumuskan paradigma baru peran ABRI Abad XXI. Kedua, merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI Abad XXI. Ketiga, pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan Pimpinan ABRI

mulai 1-4-1999 sebagai Transformasi Awal. Keempat, penghapusan Kekaryaannya ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 03/II/1999).

Kelima, penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda/Wansospolda Tk-I. Keenam, penyusutan jumlah anggota F.TNI/Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik. Ketujuh, TNI tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis/day to day Politics. Kedelapan, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada. Kesembilan, komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu. Kesepuluh, penataan hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI). Kesebelas, revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI Abad XXI. Keduabelas, perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komsos. Ketigabelas, perubahan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster). Keempatbelas, penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim. Kelimabelas, likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI. Keenambelas, penerapan akuntabilitas publik terhadap Yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer.

Ketujuhbelas, likuidasi Organisasi Wakil Panglima TNI. Kedelapanbelas, penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda. Kesembilanbelas, penegasan calon KDH dari Tentara Nasional Indonesia sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan. Keduapuluh, penghapusan Posko Kewaspadaan. Keduapuluh satu, pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI. Keduapuluh dua, likuidasi Organisasi Kaster TNI. Keduapuluh tiga, likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP Panglima TNI No.21/ VI/ 2005. Keduapuluh empat, berlakunya doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan Catur Dharma Eka Karma (Cadek) sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007. Sebagai alat pertahanan negara, TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara. Visi Misi TNI adalah untuk mewujudkan Pertahanan Negara yang tangguh dan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara NKRI serta keselamatan bangsa. (MABES TNI, 2017)

Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia, Tentara Pejuang yaitu tentara yang berjuang menegakkan NKRI dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan

menyelesaikan tugasnya, Tentara Nasional yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama, Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. (MABES TNI, 2017)

1. TNI ANGKATAN DARAT (TNI-AD)

Sebagai bagian dari TNI, tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam PPPA TNI AD TA 2014 (No. 57 Tanggal 16 Desember 2013) yang tertuang dalam lampiran Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/57/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 disebutkan bahwa Melaksanakan tugas TNI Matra Darat di bidang pertahanan, yaitu dengan melakukan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang, dengan prioritas, Meningkatkan kemampuan Intelijen dan pembinaan Teritorial untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan khususnya di daerah perbatasan, pulau terluar dan di daerah rawan konflik, Menyiapkan satuan-satuan operasional baik kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan khususnya di daerah rawan konflik, rawan separatis, perbatasan dan pulau-pulau terluar sesuai dengan eskalasi ancaman.

Menyiapkan dan memelihara kemampuan operasional Angkatan Darat yang profesional dengan cara meningkatkan pembinaan kekuatan satuan sehingga diperoleh kemantapan satuan untuk menangkal segala bentuk ancaman. Menyiapkan satuan dalam rangka kerja sama Militer Internasional dengan Angkatan Bersenjata negara sahabat dan melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, Menyiapkan satuan operasional dalam rangka mengatasi pemberontak bersenjata, gerakan separatis bersenjata dan aksi terorisme, Menyiapkan satuan dalam rangka tugas pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintahan Asing yang sedang berada di Indonesia, Menyiapkan satuan dalam rangka tugas perbantuan kepada Polri atas

permintaan sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku, Menyiapkan dan menyiagakan satuan dalam rangka tugas membantu pemerintah menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan serta pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), Membantu tugas pemerintah di daerah melalui program Operasi Bakti TNI dan Karya Bakti TNI.

Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain dan pulau-pulau terluar, yaitu dengan melakukan segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan darat dengan negara lain dan di pulau-pulau terluar dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran, dengan prioritas Menyiapkan satuan-satuan Angkatan Darat untuk melaksanakan operasi pengamanan wilayah perbatasan seperti Papua-PNG, Kalimantan-Malaysia, NTT-RDTL dan pengamanan pulau-pulau terluar, Melanjutkan pembangunan fasilitas dan pengisian materiil serta bekal untuk satuan baru di wilayah rawan konflik dan perbatasan dan Melanjutkan pemetaan wilayah daratan yang belum terpetakan, khususnya di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta Melaksanakan kegiatan TMMD skala besar di wilayah perbatasan. (TNI ANGKATAN DARAT)

Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan Matra Darat, yaitu dengan melakukan segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk mewujudkan penampilan Postur TNI AD yang merupakan keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI AD serta tersusunnya komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara Matra Darat, dengan prioritas seperti Pembangunan kekuatan TNI AD diarahkan agar dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah darat yang pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), Menyiapkan kemampuan operasional TNI AD yang profesional dengan cara memelihara dan meningkatkan kemantapan satuan dalam rangka kesiapsiagaan operasional.

Melanjutkan Reformasi Birokrasi di lingkungan internal TNI AD yang dilaksanakan secara konseptual, gradual, konstitusional dan berkelanjutan yang meliputi aspek doktrin, struktur, kultur dan mind set yang merupakan bagian integral dari Reformasi Birokrasi TNI yang bermuara pada sasaran akhir Reformasi Birokrasi Nasional antara

lain meningkatnya kualitas pelayanan publik (Public Servant), Meningkatkan profesionalisme melalui peningkatan kuantitas dan kualitas 10 komponen pendidikan dan latihan, diprioritaskan kepada penyempurnaan kurikulum pendidikan maupun materi dan metoda latihan yang menjamin terbentuknya profesionalisme, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelatih serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan dengan menitikberatkan kepada penajaman materi pelajaran/ pelatihan sehingga diperoleh pencapaian tujuan operasional pendidikan dan latihan secara efektif. Memaksimalkan program pendidikan dan latihan perwira TNI AD secara efektif dan efisien dengan mengedepankan proses belajar mengajar dan pelatihan yang interaktif serta konstruktif, guna menghasilkan perwira-perwira TNI AD yang handal dan profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dengan menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara di darat sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta melalui pembinaan teritorial yaitu membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi Militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta, membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung sesuai UU. (TNI ANGKATAN DARAT)

Visi Misi Angkatan Darat yakni Solid, Profesional, Tangguh, Modern, Berwawasan Kebangsaan dan Dicintai Rakyat dan Misinya adalah Mewujudkan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan jajaran TNI Angkatan Darat yang profesional dan modern dalam penyelenggaraan pertahanan NKRI di darat, Meningkatkan dan memperkuat jatidiri prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh, yang memiliki keunggulan moral, rela berkorban dan pantang menyerah dalam menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan integritas keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Mewujudkan kualitas prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki penguasaan ilmu dan keterampilan prajurit melalui pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan yang sistematis, dan meningkatkan kesejahteraannya. Mewujudkan kesiapan operasional penindakan ancaman baik dalam bentuk ancaman

tradisional maupun ancaman non tradisional. Mewujudkan kerja sama militer dengan negara-negara sahabat. baik dalam rangka confidence building measure (CBM) maupun untuk meningkatkan profesionalitas prajurit, mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai roh kekuatan TNI Angkatan Darat dalam upaya pertahanan negara. (TNI ANGKATAN DARAT)

Dalam gelar TNI AD memiliki gelar kekuatan yang mencakup gelar kekuatan terpusat, gelar kekuatan kewilayahan dan gelar kekuatan pendukung. Gelar kekuatan terpusat terdiri atas gelar Kostrad dan gelar Kopassus. Gelar kekuatan kewilayahan bertumpu pada Kodam, sedangkan gelar kekuatan satuan pendukung bertumpu pada gelar satuan Balakpus. (BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA, hal. 105)

2. TNI ANGKATAN LAUT (TNI- AL)

Dalam gelar TNI AL memiliki gelar organisasi, kekuatan dan kemampuan. Dalam postur disesuaikan dengan struktur organisasi pembentukan Koarmada RI, mulai dari kekuatan terpusat, kewilayahan serta pendukung. Gelar organisasi terdiri atas organisasi kekuatan terpusat, organisasi kekuatan kewilayahan dan organisasi kekuatan pendukung.

Sejarah TNI-AL dimulai tanggal 10 September 1945, setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia, administrasi pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut). BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) pada masa penjajahan Belanda dan Kaigun pada masa pendudukan Jepang. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal-kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Disamping itu mereka juga melakukan

pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.

Selama 1949-1959 ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang Organisasi ALRI membentuk Armada, Korps Marinir yang saat itu disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal-kapal perang jenis korvet kelas Parchim, kapal pendarat tank (LST) kelas 'Frosch', dan Penyapu Ranjau kelas Kondor. Penambahan kekuatan ini dinilai masih jauh dari kebutuhan dan tuntutan tugas, lebih-lebih pada masa krisis multidimensional ini yang menuntut peningkatan operasi namun perolehan dukungannya sangat terbatas. Reformasi internal di tubuh TNI membawa pengaruh besar pada tuntutan penajaman tugas TNI AL dalam bidang pertahanan dan keamanan di laut seperti reorganisasi dan validasi Armada yang tersusun dalam flotila-flotila kapal perang sesuai dengan kesamaan fungsinya dan pemekaran organisasi Korps Marinir dengan pembentukan satuan setingkat divisi Pasukan Marinir-I di Surabaya dan setingkat Brigade berdiri sendiri di Jakarta. (TNI-AL, SEJARAH TNI ANGKATAN LAUT)

Tugas TNI Angkatan Laut Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 9 adalah melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. (TNI-AL, TUGAS TNI ANGKATAN LAUT)

Doktrin TNI Angkatan Laut definisi paling sederhana, doktrin adalah suatu ajaran. Sedangkan definisi umum tentang Doktrin Militer adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh militer sebagai pedoman untuk bertindak dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu istilah doktrin yang dimaksudkan disini adalah doktrin militer. Doktrin bukanlah seperangkat aturan-aturan yang penerapannya tanpa memerlukan pemikiran, melainkan merupakan suatu kerangka kerja untuk memahami hakekat konflik bersenjata dan penggunaan kekuatan militer. Tujuannya adalah untuk membimbing,

menjelaskan dan mengajarkan, serta menyediakan dasar untuk diskusi dan studi lebih lanjut. Doktrin adalah pokok pemikiran yang menyangga kebijakan pertahanan. Doktrin bersifat menerangkan dan menjelaskan, sedangkan kebijakan bersifat mengarahkan dan menentukan.

Landasan doktrin adalah sejarah, dan kewenangannya diperoleh melalui pengalaman yang bermacam-macam. Sekalipun doktrin sudah teruji oleh sejarah dan pengalaman, bukan berarti doktrin tidak boleh diubah. Doktrin berkembang sebagai respon dari perubahan politik atau latar belakang strategi, atau sebagai hasil dari teknologi baru. Oleh karena itu, doktrin mempengaruhi jalan yang ditempuh dari kebijakan dan perencanaan yang akan ditetapkan, demikian pula akan mempengaruhi bagaimana kekuatan militer akan diorganisasikan dan dilatih, serta bagaimana cara memperoleh peralatan yang dibutuhkan. Hubungan antara doktrin dengan strategi adalah bahwa *Doctrine influences strategy and results of strategy become the experiences that are the basis for doctrine*. Doktrin memiliki arti sangat penting, karena pemahaman terhadap doktrin dapat membantu memperjelas pemikiran untuk memutuskan cara bertindak pada situasi kekacauan yang disebabkan oleh krisis atau perang. Doktrin memberikan bimbingan dan latihan konsistensi bersikap dan berperilaku, kebersamaan dan saling mempercayai, untuk menghasilkan suatu tindakan kolektif yang wajar dan benar. Di samping itu, doktrin dapat mengarahkan organisasi atau komando untuk menjamin keterpaduan pencapaian sasaran.

Sejarah Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya, Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya telah menggariskan landasan sejarah dari peran Angkatan Laut di dunia, hal mana merupakan fakta dari sejarah bahwa kebesaran suatu bangsa atau negara maritim sangat ditentukan oleh kekuatan lautnya, berupa kekuatan armada niaganya yang mampu berlayar mengarungi samudera untuk melakukan perdagangan. Untuk menjamin keselamatan dari armada niaga, maka dibentuklah suatu kekuatan armada bersenjata yaitu Angkatan Laut. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, maka kehadiran angkatan laut untuk memberikan jaminan keamanan di laut, sudah merupakan suatu *conditiosine quanon*.

Doktrin formal TNI AL dimulai dengan diresmikannya Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya berdasarkan Keputusan Menteri / Panglima ALRI Nomor : 5000.1 pada tanggal 17 Agustus 1965, dan kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tahun 1965 itu juga. Esensi dari Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya adalah semangat perjuangan Angkatan Laut

pada waktu itu, setelah keberhasilan perjuangan bangsa dalam membebaskan Irian Jaya dilanjutkan masuk dalam kancah konfrontasi dengan Malaysia. Oleh karena itu nuansa Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya tahun 1965 adalah nuansa membangkitkan semangat perjuangan. Eka Sasana Jaya tahun 1965 itu juga dimaksudkan sebagai Doktrin Keamanan Revolusi Indonesia, sebagai Doktrin Kekaryaannya ALRI, dan sebagai Doktrin Bahari Indonesia. Sebelum itu, sebenarnya sudah ada publikasi-publikasi resmi ALRI yang digunakan sebagai Petunjuk Tempur. Secara formal belum disebut sebagai suatu doktrin, namun pada dasarnya adalah doktrin pada level operasi dan taktik, misalnya Prosedur Operasi Amfibi, Operasi Anti Kapal Selam, maupun prosedur Bantuan Tembakan Kapal dan Bantuan Tembakan Udara. Di samping itu, pemikir ALRI pada waktu itu juga berhasil merumuskan suatu pedoman sikap mental dan tingkah laku prajurit, yaitu Trisila Angkatan Laut. Konsep Trisila dicetuskan oleh Laksamana Muda TNI Anumerta Yos Sudarso pada tahun 1956 ketika almarhum masih berpangkat Mayor, dan didiskusikan bersama rekan-rekannya antara lain Laksamana Mursalim dan Laksamana Mulyadi yang waktu itu masih berpangkat Kapten. Trisila yang terdiri dari ; Disiplin, Hirarki dan Kehormatan Militer, tidak bertentangan dan justru bersumber dari Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit maupun Delapan Wajib TNI, dan merupakan suatu konsepsi yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan, sumber semangat Korps, serta mendorong terciptanya kehidupan Khas TNI AL sesuai medan juangnya di laut yang begitu unik dan berat.

Istilah "doktrin" bagi TNI/ABRI mulai digunakan lagi sejak tahun 1982 ketika diresmikan Doktrin Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara bagi TNI/ABRI pada waktu itu, yang kemudian dimantapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1988 disahkan Doktrin Catur Dharma Eka Karma berdasarkan Keputusan Pangab Nomor : Kep/04/II/1988 tanggal 27 Februari 1988, yang dimaksudkan sebagai Doktrin Induk bagi TNI/ABRI. Selanjutnya pada tahun 1991 disahkan Doktrin Pertahanan Keamanan Negara berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor: Kep/17/X/1991 tanggal 5 Oktober 1991, dimaksudkan sebagai Doktrin Dasar TNI/ABRI. Kemudian pada tahun 1994 diresmikan Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti berdasarkan Keputusan Pangab Nomor : Kep/05/III/1994 tanggal 21 Maret 1994, sebagai Doktrin Pelaksana TNI/ABRI. Sampai akhir dekade 90-an, TNI/ABRI

disatukan dengan tiga buah doktrin level strategi ; Doktrin Dasar adalah Doktrin Hankamneg 1991, Doktrin Induk adalah Doktrin Catur Dharma Eka Karma 1988, dan Doktrin Pelaksanaannya adalah Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti 1994.

Dengan disatukannya TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri dalam ABRI dan digunakannya Doktrin Catur Dharma Eka Karma 1988 sebagai Doktrin Induk serta Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti 1994 sebagai Doktrin Pelaksanaan, masing-masing doktrin angkatan otomatis tidak digunakan lagi. Doktrin Induk maupun Doktrin Pelaksanaan dijabarkan di masing-masing angkatan berupa Buku-Buku Petunjuk. Di TNI AL Buku-Buku Petunjuk tersebut dijabarkan dan ditata dalam suatu stratifikasi : Buku Petunjuk Dasar (PUM-1), Buku Petunjuk Induk (PUM-1.01 s/d PUM-1.13), dan Buku Petunjuk Pembinaan maupun Buku Petunjuk Operasi, kesemuanya pada dasarnya adalah doktrin pada level operasi dan taktik.

Perubahan situasi politik dan pemerintahan pada tahun 1998 yang kemudian diikuti dengan penataan fungsi dan peran TNI berdasarkan paradigma baru TNI, antara lain perubahan ABRI kembali menjadi TNI dan lepasnya Polri dari ABRI, kemudian dihapuskannya Dwifungsi ABRI, mendorong masing-masing angkatan untuk merevisi dan menata kembali doktrin angkatan maupun publikasi-publikasi resmi yang digunakan dalam Pembinaan, Pengembangan, dan Penggunaan Kekuatan. Untuk TNI AL penyusunan doktrin angkatan bertitik tolak dari pengertian doktrin militer yang dianut secara universal oleh negara-negara di dunia, dengan mengadopsi pandangan-pandangan dari para pemikir doktrin maritim maupun doktrin militer, baik di tingkat nasional maupun tingkat dunia. Pandangan-pandangan dari pemikir strategi maritim tingkat dunia semacam Alfred Thayer Mahan dan Sir Jullian Corbett bagaimanapun juga tetap mewarnai esensi dari doktrin TNI AL, di samping pemikir strategi maritim tingkat nasional seperti almarhum Laksamana Muda TNI Suwarso MSc yang hasil karya berupa kumpulan tulisan-tulisannya sampai saat ini masih digunakan sebagai salah satu referensi utama oleh TNI AL.

Garis Besar Isi Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya pada Bab I, tentang Lingkungan Laut dan Sifat Dasar Kekuatan Laut. Bab pertama ini menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan lingkungan laut dan lingkungan strategis maritime yang mendasari dimensi strategi militer, ruang tempur multi dimensi dan atribut kekuatan laut. Bab II tentang Perang dan Konflik Bersenjata. Bab selanjutnya membahas tentang hakekat

perang dan konflik bersenjata dalam suatu dimensi konflik. Hal ini menyebabkan konflik di dunia modern terbagi ke dalam macam-macam konflik serta eskalasi dan tingkatan konflik. Dengan demikian peperangan laut juga akan terbagi pada tingkatan komando dan perencanaan serta hubungannya dengan konvensi internasional. Bab III tentang Konsepsi Pertahanan Negara di Laut. Bab ini mengulas makna laut bagi bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan konsepsi dasar pertahanan negara. Konsepsi ini juga mewadahi kepentingan nasional serta fungsi dan peran angkatan laut yang dituangkan ke dalam pokok-pokok pertahanan laut nusantara. Penerapan konsep ini dibatasi dengan kawasan operasi/focal area tertentu sebagai mandala perang dan sejalan dengan konsep pelibatan dan daerah latihan sesuai prinsip-prinsip perang laut. Bab IV tentang Kekuatan dan Kemampuan Maritim. Bab berikutnya memberikan gambaran bagaimana kekuatan dan kemampuan maritim diproyeksikan menjadi kemampuan TNI AL sekaligus implementasinya dalam bentuk kemampuan operasi di laut.

Bab V tentang pokok-pokok Penggunaan Kekuatan Laut. Bab ini mengalir dari kemampuan operasi di laut oleh TNI AL dalam penggunaan pada tugas perang dan penggunaan tugas non perang. Bab VI tentang Perencanaan dan penyelenggaraan Operasi dan Kampanye Maritim. Bab ini menjabarkan tujuan strategi militer yang ingin dicapai memanfaatkan seni operasi. Tujuan ini dicapai melalui kampanye maritim yang didahului dengan suatu proses perencanaan yang terpadu dan terinci sesuai tahapan kampanye maritim. Bab VII tentang Komando Pengendalian dan Dukungan Logistik. Bab terakhir ini menjelaskan masalah komando dan pengendalian pada saat operasi laut berlangsung untuk mendukung kampanye maritim. Selain itu juga disinggung mengenai komunikasi dan elektronika serta dukungan logistik yang dapat diberikan.

Stratifikasi Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya, Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya. Doktrin ini adalah Doktrin TNI AL yang menjadi landasan bagi doktrin-doktrin lainnya yang diwujudkan dalam Buku-buku Petunjuk dan digunakan pedoman oleh jajaran TNI AL. Posisi Doktrin ini dalam hirarki Doktrin Pertahanan Negara, digambarkan pada Lampiran "A". Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya menjelaskan lingkungan laut dan sifat dasar kekuatan laut, perang dan konflik bersenjata, konsepsi pertahanan negara di laut, kekuatan dan kemampuan maritim serta memberikan gambaran bagaimana kekuatan TNI AL dapat memberikan kontribusinya untuk pertahanan negara. Ini searah dengan bagaimana kemungkinan kekuatan tempur dapat digunakan, dalam hubungannya dengan masing-masing angkatan maupun dengan komponen bangsa lainnya, untuk

masa sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. (TNI-AL, DOKTRIN TNI ANGKATAN LAUT)

Visi dan Misi TNI AL yakni "Terwujudnya TNI AL yang handal dan disegani" Misi TNI AL ada 7 yakni Membina kekuatan dan kemampuan TNI AL yang berkelanjutan secara efektif dan efisiensi, Menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum, keamanan wilayah laut, keutuhan wilayah NKRI serta terlaksananya diplomasi angkatan laut dan pemberdaya wilayah pertahanan laut, Mewujudkan personel TNI AL yang bermoral dan professional, Mewujudkan kekuatan TNI AL menuju kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force / MEF), Menjamin terlaksananya tugas-tugas bantua kemanusiaan, Mewujudkan organisasi TNI AL yang sehat dan berwibawa, Mewujudkan keluarga besar TNI AL yang sehat dan sejahtera. (TNI-AL, VISI TNI AL)

Trisila TNI AL lahir dari pemikiran prajurit TNI AL yang dapat dijadikan tauladan karena kedisiplinan dan loyalitas terhadap TNI AL maupun kepada negara RI. Lahirnya Trisila TNI AL didorong oleh situasi organisasi TNI AL waktu itu, dimana terjadi keresahan dikalangan perwira disebabkan adanya kebijaksanaan untuk menerima dan mengangkat mantan anggota KM (*Koninklijke Marine*) menjadi anggota ALRI. Untuk mencegah terjadinya perpecahan, maka dibutuhkan suatu konsepsi yang dapat mengikat mental dan semangat juang, menggalang tekad kebersamaan dalam meningkatkan kadar pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia. Konsep Trisila TNI AL yang mendapat tanggapan positif, dan akhirnya juga diedarkan kepada para Perwira pemegang jabatan komando untuk ditanggapi sebagai bukti persetujuannya. Dengan demikian jiwa dan semangat Trisila TNI AL adalah sebagai suatu konsepsi yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan dalam melaksanakan pengabdian.

Makna Trisila TNI AL dalam bahasa Sansekerta, "Tri" berarti tiga sedangkan "Sila" berarti azas atau dasar. Jadi Trisila TNI AL berarti Tiga Azas atau Pedoman Dasar pertama yakni Disiplin, berarti bahwa anggota TNI AL mentaati segala peraturan dan tata tertib berdasarkan kesadaran pengabdian. Kedua Hierarki, berarti bahwa anggota TNI AL menempatkan diri dan bertindak sesuai dengan tata urutan kepangkatan, kedudukan dan jabatan didalam organisasi dan pola pembinaan TNI AL. Ketiga Kehormatan militer, berarti bahwa anggota TNI AL menjunjung tinggi nama baik Angkatan dan negara dengan selalu berfikir, bersikap dan berbuat tanpa cela.

Trisila TNI AL tidak bertentangan dan justru bersumber pada Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, maupun Cadec dan Delapan Wajib TNI. Trisila TNI AL mendorong terciptanya kehidupan khas TNI AL sesuai matra medan perangnya di laut yang begitu unik dan berat. Pengertian Nilai-nilai Trisila TNI AL yakni Disiplin, Disiplin adalah sikap mental sebagai gambaran dan kualitas moral oleh sebab itu disiplin berkaitan erat dengan kepribadian yang dimiliki seseorang. Disiplin dapat ditanamkan melalui pendidikan dan latihan serta akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kepribadian seseorang. Disiplin merupakan factor penentu bagi keberhasilan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Nilai-nilai disiplin yang perlu dijadikan pedoman yaitu disiplin merupakan cermin kehidupan setiap prajurit Sapta Marga yang dengan penuh kesadaran senantiasa mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TNI/TNI AL. Disiplin berlaku bagi setiap prajurit di mana saja, kapan saja dan dalam kondisi apa saja. Disiplin adalah tanggung jawab bagi individu, setiap atasan, setiap satuan atau organisasi. Disiplin harus selalu ditegakkan, dipelihara dan dibina secara terus menerus selama keberadaan prajurit dan organisasi itu berdiri. Setiap prajurit yang melanggar disiplin harus dikenai sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali. Prajurit TNI AL yang disiplin adalah prajurit yang melaksanakan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Trisila TNI AL dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. Prajurit tanpa disiplin sama saja dengan gerombolan yang dipersenjatai dan dapat membahayakan kesatuan/organisasi, lingkungan, bangsa dan negara.

Hierarki adalah suatu struktur wewenang yang berjenjang mulai wewenang paling atas ke tingkat paling bawah, dan merupakan suatu mata rantai yang terbentang dari atas ke bawah tidak terputus. Dalam organisasi militer hierarki adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan karena diperlukan untuk mengatur rantai komando dan pengendalian dalam memperlancar jalannya roda organisasi, memudahkan koordinasi dan pengawasan serta untuk memupuk nilai-nilai etika bagi anggota militer. Hierarki dapat memberikan pembatasan yang tegas pada tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang dari pengawak organisasi. Pembatasan tersebut bukan berarti memisahkan, melainkan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, saling mempercayai dan saling kerjasama untuk melaksanakan tugas yang diemban oleh organisasi dengan sebaik-baiknya.

Nilai-nilai hierarki yang perlu dijadikan pedoman yaitu Hierarki adalah cermin kehidupan prajurit TNI AL, Setiap prajurit TNI AL secara ikhlas dan penuh kesadaran senantiasa dapat menempatkan dirinya sesuai dengan pangkat dan jabatan serta lingkungannya, Setiap prajurit TNI AL secara ikhlas dan penuh kesadaran senantiasa dapat berinteraksi dengan lingkungan, serta dapat menerapkan pola hubungan atasan bawahan, hubungan kekeluargaan dan hubungan kemitraan, Prajurit TNI AL mengabdikan kepada tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan mengabdikan kepada individu atau atasan, Hierarki dalam organisasi, kepangkatan dan jabatan harus menumbuhkan rasa kebersamaan, pesatuan dan kesatuan, serta dapat meningkatkan motivasi dan kinerja organisasi dan bukan sebaliknya, Hierarki dalam kehidupan prajurit TNI AL, harus mendorong sinergitas yang menghasilkan keluaran yang optimal dengan senantiasa penuh keikhlasan dan kesadaran, menghargai perbedaan, menghormatinya dan membangun kekuatan dan menyeimbangkan kelemahan-kelemahan yang timbul dari perbedaan-perbedaan yang ada, Hierarki dalam kehidupan prajurit TNI AL, harus mendorong bagi pemimpin dan yang dipimpin, untuk senantiasa dengan ikhlas dan penuh kesadaran, meningkatkan kerjasama yang dilandasi oleh rasa saling percaya, bahwa segala sesuatunya ditujukan untuk kepentingan dan tujuan organisasi.

Kehormatan militer adalah kebesaran dan kemuliaan atau keagungan militer. Kehormatan militer mengedepankan sikap mental yang diharapkan bagi prajurit TNI AL sesuai dengan yang telah digariskan dalam Peraturan Disiplin Tentara sesuai PP Nomor : 24 tahun 1949, yaitu bahwa dengan menjauhkan diri dari setiap perbuatan ucapan, dan pikiran yang dapat menodai nama baik militer berarti ia telah turut serta menegakkan kehormatan militer. Kehormatan militer bertujuan menanamkan sikap mental prajurit TNI AL agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menodai nama baik sendiri, organisasi TNI AL maupun negara. Nilai-nilai kehormatan militer yang perlu dijadikan pedoman yakni Kehormatan militer adalah sendi kehidupan prajurit TNI AL yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap prajurit TNI AL, Setiap prajurit TNI AL harus merasa malu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan kehormatan militer, Setiap prajurit TNI AL senantiasa berjiwa ksatria, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, Setiap prajurit TNI AL senantiasa setia dan menepati janji serta sumpah prajurit, Setiap prajurit TNI AL senantiasa rela berkorban

mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan, Setiap prajurit TNI AL senantiasa bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang telah diambilnya dan dengan penuh kesadaran selalu berusaha bahwa segala keputusan dan tindakan semata-mata untuk kepentingan kedinasan, negara dan bangsa. (TNI-AL, TRISILA TNI ANGKATAN LAUT)

3. TNI ANGKATAN UDARA (TNI-AU)

TNI AU lahir dengan dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada Tanggal 23 Agustus 1945, guna untuk memperkuat Armada Udara yang saat itu berkekurangan pesawat terbang dan fasilitas-fasilitas lainnya. pada tanggal 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) jawatan penerbangan di bawah Komodor Udara Soerjadi Soerjadarma. Pada tanggal 23 Januari 1946 TKR ditingkatkan lagi menjadi TRI, sebagai kelanjutan dari perkembangan tunas Angkatan Udara. Pada tanggal 9 April 1946, TRI jawatan penerbangan dihapuskan dan diganti menjadi Angkatan Udara Republik Indonesia, yang kini diperingati sebagai hari lahirnya TNI AU yang diresmikan bersamaan dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada 29 Juli 1947 tiga kadet penerbang TNI AU masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharnoko Harbani dan Kadet Sutarjo Sigit dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Guntei berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat, masing-masing di Kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa.

Modal awal TNI AU adalah pesawat-pesawat hasil rampasan dari tentara Jepang seperti jenis Cureng, Nishikoren, serta Hayabusha. Pesawat-pesawat inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya TNI AU. Setelah keputusan Konferensi Meja Bundar tahun 1949, TNI AU menerima beberapa aset Angkatan Udara Belanda meliputi pesawat terbang, hanggar, depo pemeliharaan, serta depot logistik lainnya. Beberapa jenis pesawat Belanda yang diambil alih antara lain C-47 Dakota, B-25 Mitchell, P-51 Mustang, AT-6 Harvard, PBY-5 Catalina, dan Lockheed L-12. Tahun 1950, TNI AU mengirimkan 60 orang calon penerbang ke California Amerika Serikat, mengikuti pendidikan terbang pada Trans Ocean Airlines Oakland Airport (TALOA). Saat itu TNI AU mendapat pesawat tempur dari Uni Soviet dan Eropa Timur, berupa MiG-17, MiG-19, MiG-21, pembom ringan Tupolev Tu-2, dan pemburu Lavochkin La-11. Pesawat-pesawat ini mengambil peran dalam Operasi Trikora dan Dwikora. TNI AU mengalami popularitas nasional tinggi di bawah dipimpin oleh KASAU Kedua Marsekal Madya TNI Omar Dhani awal 1960-an. TNI AU memperbarui armadanya pada awal tahun

1980-an dengan kedatangan pesawat OV-10 Bronco, A-4 Sky Hawk, F-5 Tiger, F-16 Fighting Falcon, dan Hawk 100/200. (TNI ANGKATAN UDARA)

Visi Misi Angkatan Udara yakni Terwujudnya postur TNI AU yang professional, efektif, efisien, modern, dinamis dan handal dalam rangka menegakkan serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta Misinya adalah Mewujudkan kemampuan dan kekuatan sistem, personel, material alutsista dan fasilitas untuk memenuhi postur TNI AU yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan fungsi-fungsi intelijen dan pengamanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi TNI AU. Melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas TNI AU baik dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Melaksanakan kegiatan bantuan kemanusiaan dan bakti sosial dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi kemandirian nasional, regional dan internasional serta untuk meningkatkan hubungan antar negara. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terhadap strategi dan sistem pertahanan, sumber daya manusia, serta kemampuan dan pendayagunaan industri strategis nasional untuk kepentingan pertahanan matra udara serta Meningkatkan pemberdayaan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengawasan dilingkungan TNI AU melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (TNI ANGKATAN UDARA)

Dalam menjamin kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, TNI Angkatan Udara bertugas Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara serta Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. (TNI ANGKATAN UDARA)

Pelaksanaan tugas diwujudkan dalam kegiatan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Pelaksanaan tugas tersebut meliputi : Operasi Militer untuk Perang terdiri atas: Operasi Pertahanan Udara, meliputi kegiatan Operasi

Hanud Aktif dan Operasi Hanud Pasif. Operasi Serangan Udara Strategis, meliputi kegiatan Operasi Pengamatan dan Pengintaian Udara Strategis, Operasi Penyerangan Udara dan Operasi Perlindungan Udara. Operasi Lawan Udara Ofensif, meliputi kegiatan Operasi Penyerangan dan Operasi Perlindungan Udara. Operasi Dukungan Udara, meliputi kegiatan Operasi Penyekatan Udara, Operasi Serangan Udara Langsung, Operasi Pengungsian Medis Udara, Operasi Angkutan Udara, Operasi Patroli Udara, Operasi Pengintaian Udara Taktis, Operasi Pengisian Bahan Bakar di Udara, Operasi Perlindungan Udara, Operasi SAR Tempur, Operasi Pengamanan Alutsista, Operasi Bantuan Tembakan Udara dan Operasi Khusus. Operasi Informasi, meliputi kegiatan Operasi Lawan Informasi Ofensif dan Operasi Lawan Informasi Defensif. (TNI ANGKATAN UDARA)

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berupa Operasi Pertahanan Udara, Operasi Dukungan Udara dan Operasi Informasi, dalam rangka Mengatasi gerakan separatis bersenjata, Mengatasi pemberontakan bersenjata, Mengatasi aksi terorisme, Mengamankan wilayah perbatasan, Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, Mendukung mengamankan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta keluarganya, Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka sistem pertahanan semesta, Membantu tugas pemerintahan di daerah, Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, Mendukung mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan asing yang sedang berada di Indonesia, Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*), Membantu pemerintah untuk pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Dalam gelar TNI AU melaksanakan gelar kekuatan yang diselenggarakan dalam kerangka strategi pertahanan udara dengan konsep strategi untuk memberikan efek daya tangkal dan mengamankan wilayah dirgantara Indonesia sampai di luar wilayah ZEE Indonesia. Penggelaran kekuatan TNI AU diarahkan untuk menghancurkan kekuatan musuh dan memberikan payung udara guna melindungi kekuatan TNI dalam penyelenggaraan operasi, baik di laut maupun di darat. (BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA)

B. Kondisi Kemiliteran China

Salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah kerja sama antar negara. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan posisinya menjadikan pertahanan negara tidak hanya berdimensi nasional, melainkan juga internasional. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengembangkan kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain dalam mendukung tercapainya kepentingan nasional di bidang pertahanan. Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif dan membangun kerja sama internasional dengan tetap berpedoman pada prinsip sebagai negara nonblok yang tidak melakukan aliansi dengan negara manapun. Namun demikian, Indonesia tetap berupaya secara aktif dalam percaturan internasional guna terciptanya kawasan yang damai, baik pada lingkup regional maupun global.

Kerja sama internasional dibentuk dalam beberapa organisasi internasional di dunia ini dan meliputi semua bidang seperti kerja sama internasional di bidang ekonomi, kerja sama internasional di bidang militer dan pertahanan, kerja sama internasional di bidang kesehatan, kerja sama internasional di bidang sosial serta kerja sama internasional di bidang pendidikan.

Militer China merupakan bagian yang sangat penting dari strategi nasionalnya. Pada beberapa tahun terakhir, China telah menjadi salah satu negara yang pengaruhnya patut diperhitungkan baik dalam skala regional maupun global. (Ganewati Wuryandari, 2011) China mengembangkan potensi militernya yang sangat difokuskan kepada Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Militer menjadi instrument untuk mempertahankan kedaulatan nasional, integrasi teritorialnya, serta mencegah musuh yang dapat mengganggu kepentingan nasional China. (Yulianto, 2009, hal. 2) Oleh sebab itu, China tumbuh menjadi negara yang sangat fokus dalam mengembangkan kekuatan militernya. Kapasitas militer China dapat dilihat dari adanya berbagai jenis peralatan militer yang modern baik di bidang armada darat, udara, maupun laut. (DPR, 2012) Mengukur kekuatan militer China juga dapat tinjau dari alokasi anggaran militer China. Pengembangan peralatan perang berteknologi tinggi akan diterapkan pada seluruh angkatan bersenjata China. Diharapkan setelah tahun 2020 China akan menjadi kekuatan laut yang handal dan berskala global. (DR. Yanyan Mochamad Yani, Bandung, hal. 3)

Setelah muncul tekanan publik mengenai transparansi belanja militer Negara, pada tanggal 6 Mei 2017 China mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan negaranya menjadi 1.044 triliun yuan atau setara US\$141,43 miliar. Kementerian Pertahanan China akan memperkuat pertahanan maritim dan udara. (Samosir, 2017) Jenis peralatan militer China yakni 31.300 senjata berbasis darat, 8.200 tank, 5.000 kendaraan pengangkut pasukan, 14.000 meriam, 1.700 senjata pendorong, 2.400 sistem peluncur roket, 16.000 mortir, 6.500 senjata kendali anti tank, dan 7.700 senjata anti-pesawat. (Peningkatan Kekuatan Militer China, 2012) Pada awal Januari 2017 Angkatan Laut China mengoperasikan satu kapal induk dan kekuatan total personel tempurnya sekitar 750.000.000 orang yang semuanya terlatih baik. Untuk menyokong kekuatan militernya, China menggelontorkan dana hingga USD126 miliar. (Syafar, 2017)

Pembangunan kekuatan laut Cina tak lepas pula dari strategi *Offshore Defense* yang kini dianut oleh Angkatan Laut Cina. *Offshore Defense* merupakan konsep strategis yang mengarahkan Angkatan Laut Cina untuk bersiap memenuhi tiga misi kunci “untuk periode baru” melalui pelibatan dalam operasi-operasi maritim di laut dan membangun Angkatan Laut yang mampu melaksanakan operasi berkelanjutan di laut. Tiga misi kunci yang diemban oleh Angkatan Laut Cina yaitu menjaga musuh dalam batas dan menolak invasi dari laut, melindungi kedaulatan teritorial nasional dan menjaga keutuhan ibu pertiwi dan hak-hak maritim. Apabila kini dikenal istilah *two island chains* yang terdiri dari *first island chain* dan *second island chain*, hal itu seringkali membingungkan bagi pihak asing ketika mengaitkannya dengan *Offshore Defense*. Penting untuk dipahami bahwa kini *Offshore Defense* tidak lagi terkait batas geografis tertentu seperti di era lalu. Strategi itu kini telah berevolusi dan mengacu pada pernyataan Presiden Jiang Zemin pada tahun 1997 bahwa Angkatan Laut Cina “harus fokus pada memunculkan kemampuan tempur komprehensif di lepas pantai dalam *first island chains*, harus meningkatkan penangkalan konvensional dan nuklir dan kemampuan serangan balik, dan harus secara bertahap membangun kemampuan tempur untuk pertahanan samudera jauh”. (Salim, 2012)

Satu diantara bidang kerja sama yang dicakup dalam ASEAN *Community* adalah keamanan dalam wadah ASEAN *Security Community* (ASC). AMF adalah wadah yang disediakan dalam ASC untuk membahas kerja sama maritim, termasuk menyangkut isu keamanan maritim. Nampak jelas bahwa konflik yang terjadi di Laut China Selatan

sangat mempengaruhi stabilitas kawasan khususnya hubungan kerja sama pertahanan antar negara yang terlibat konflik dalam mempertahankan kepentingan masing-masing negara. China saat ini sedang giat menambah armada kapal induk, kapal berkapasitas berat, dan kapal selam untuk melindungi klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan. (as, 2017)

1. Sejarah Kerja Sama Indonesia - China

Kerja sama dalam bidang militer merupakan salah bentuk upaya China dalam mewujudkan komitmen sebagai negara militer kuat global. Selain hal tersebut, kerja sama militer merupakan bentuk kesungguhan China dalam turut berpartisipasi mewujudkan stabilitas keamanan global dan mengamankan kepentingan nasionalnya. (Yasuhiro, 2014, hal. 1) Berbagai kerja sama militer dibangun oleh China baik secara bilateral maupun multilateral.

Pada masa Orde Baru, sikap anti komunisme selalu diasosiasikan dengan penutupan hubungan dengan China dalam semua hal. Bahkan pada level *grass-root* penutupan hubungan ini dibumbui oleh kebencian terhadap kaum minoritas etnis China di Indonesia sehingga mendorong pemikiran-pemikiran sentimen anti-China, yang mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Puncaknya, terjadi pada Mei 1998, di mana kekerasan massal terjadi di Jakarta dan beberapa tempat lainnya pada kaum China. Hubungan kedua negara sempat dibekukan pada masa Orde Baru, tepatnya pada 30 Oktober 1967, dikarenakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pernah menjadi penghancur persatuan bangsa Indonesia, diduga memiliki keterkaitan dengan China dalam menyediakan dana dan dukungan politik bagi PKI. (Sukma) Beruntung hubungan tersebut mendapatkan momentum positif, apalagi Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada akhir tahun 1999 membuat langkah krusial untuk memperbaiki hubungan dengan China melalui pernyataan untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah China di masa depan.

Pada tahun 2002, Presiden Megawati presiden ke-5 mengunjungi China disertai delegasi bisnis dari Indonesia. Kemudian pada 2005, ketika Presiden China Hu Jintao berkunjung ke Indonesia, Hu Jintao merealisasikan perjanjian kemitraan strategis dengan Indonesia. Pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bertujuan untuk mengembangkan rencana aksi dari pengembangan kemitraan yang selama ini terputus. Kerja sama dengan China digagas dalam pelbagai bidang dan

dimulai dengan kerja sama militer yang dimulai pada tahun 2000. Dua tahun kemudian Menteri Pertahanan Indonesia, Matori Abdul Jalil, menjajaki kemungkinan kerja sama yang erat dalam hal kemiliteran dan pertahanan yang ditindaklanjuti dengan latihan militer bersama tentara Indonesia dan China pada tahun 2011 dimana tentara pasukan khusus kedua negara dilibatkan yakni (Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan *People's Liberation Army GI-A*).' Latihan bersama itu berpusat di Bandung dengan sandi *Sharp Knife*, di mana latihan tersebut berlangsung selama hampir dua minggu, mencakup berbagai cara kemiliteran termasuk anti-terorisme. Kerja sama ini menandai awal dari rangkaian kontak operasional militer kedua Negara.

Kerja sama dan latihan militer ini memakan waktu tahunan. Misalnya, kerja sama *Sharp Knife* tahun 2012 digelar di Provinsi Shandong China. *Sharp Knife* tahun 2013, kerja sama diperluas dengan menyertakan pasukan khusus Angkatan Udara Indonesia dan Angkatan Udara China, latihan selama seminggu ini melibatkan sekitat 200 personil. Pada tahun yang sama, Menteri Pertahanan Indonesia mengumumkan bahwa personil Angkatan Laut Indonesia dan China akan mengadakan latihan bersama di Laut China Selatan, dan Angkatan Udara Indonesia berencana mengirimkan pilot-pilot terbaiknya untuk menghadiri kursus penerbangan di Beijing, termasuk mencoba menggunakan simulator pesawat Sukhoi 27 dan Sukhoi 30.

Pada Februari 2014, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Moeldoko, melakukan kunjungan ke China dan menegaskan bahwa hubungan militer kedua negara harus ditingkatkan. Bahkan Jenderal TNI Moeldoko menegaskan bahwa Indonesia sudah siap untuk bekerja sama dengan setiap negara, termasuk China untuk menjaga stabilitas wilayahnya. Menurut laporan berita pada saat itu, Indonesia telah mengundang China untuk mengambil bagian utama dalam latihan komodo yang akan diadakan pada bulan Maret di Pulau Natuna. Selain kerja sama militer, hubungan Indonesia-China juga mengarah pada upaya pembangunan kerja sama dalam Industri Pertahanan (Inhan), terutama dalam produksi rudal anti-kapal (C-705) dan lainnya. Langkah ini diambil Indonesia sebagai wujud keinginan negara Indonesia untuk mendiversifikasi sumber senjata dan peralatan militernya setelah diembargo oleh AS sejak 1999 hingga tahun 2005. Melalui program tersebut, sebagai timbal baliknya, Indonesia megizinkan kapal Angkatan Laut China melalui perairan Indonesia untuk beberapa keperluan. Mungkin inilah penyebab mengapa kapal-kapal nelayan China dengan bebasnya memasuki laut Indonesia untuk mengambil ikan. (Agustino, 2017)

Selain menjalin hubungan kemiliteran, Indonesia pun berusaha membangun hubungan baru ekonomi dengan China. Meski sampai akhir tahun 2006, AS masih menjadi pasar ekspor yang besar bagi barang-barang Indonesia dari pada China, namun upaya membangun hubungan ekonomi dengan China berjalan cukup serius. Pada tahun 2008, akibat perlambatan dan terjadinya krisis keuangan yang sangat dalam di AS, maka China menjadi pasar yang penting bagi Indonesia. Implikasinya, laju pertumbuhan ekspor ke China pasca 2008 melampaui pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS, jika dilihat secara keseluruhan, maka telah terjadi perkembangan yang signifikan hubungan ekonomi antara Indonesia-China, dan ini pada akhirnya mendorong investasi besar China ke Indonesia pada masa Presiden Jokowi berkuasa. Dapat disimpulkan bahwa hubungan Indonesia-China pada Era Reformasi semakin hari semakin membaik. Kemudian hubungan ini semakin meningkat tajam pada Era Presiden Jokowi, dimana tidak sedikit mega proyek infrastruktur jatuh pada pengembang/perusahaan China. Sekali lagi, hal ini menandakan bahwa pembangunan hubungan bilateral antara Indonesia China menemukan bentuk baru selepas masa sulit di Era Orde Baru. (Agustino, 2017)

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan China dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika pemerintah kedua negara melakukan penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis pada bulan April tahun 2005. Kemitraan strategis ini mempererat hubungan Indonesia dan China dalam bidang pertahanan militer, dengan aspek utama yaitu kolaborasi industri pertahanan dan peningkatan antar lembaga keamanan di kedua negara demi melawan ancaman keamanan transnasional.

C. Bentuk Kerja Sama Militer Indonesia – China

Beberapa pointers kerja sama pertahanan RI – RRT yakni sebagai berikut dalam kesepakatan kerjasama pertahanan *Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China in Cooperation Activities in the Field of Defence* 2007 di Beijing. *MoU* tersebut telah diratifikasi menjadi UU Nomor 6 Tahun 2016, *memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the States Administration of Science Technology and Industry for National Defence of the People's Republic of China on Defence Industry Cooperation* 2011. Ditanda tangani oleh Sjafrie Sjamsoeddin, Wamenhan RI dan pihak China oleh Chen Quifa, Kepala SASTIND,

Letter of Intent for Development and Production Cooperation of Anti Ship Sea Defence Weapon System between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the State Administration of Science Technology and Industry for National Defence of the People's Republic of China 2011. Ditandatangani oleh Bapak Pos Hutabarat, Dirjen Pothan, dan pihak China oleh Ms. Zhen Chunli, DG SASTIND.

Dalam forum kerja sama yakni Jakarta *International Defense Dialogue* (JIDD) merupakan ajang dialog informal internasional tahunan yang membahas isu-isu penting seputar pertahanan dan keamanan, tidak hanya di wilayah Asia Pasifik tetapi di wilayah lain, yang diikuti lebih dari 50 delegasi terdiri dari negara-negara anggota ASEAN, China, India, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain dari Eropa dan Afrika. Penyelenggara JIDD adalah Universitas Pertahanan Indonesia dengan didukung penuh oleh Kemhan dan Kemlu RI.

Kerja sama yang telah dilaksanakan oleh kedua negara yakni dalam bidang Pendidikan. Kerja sama pendidikan telah berlangsung sejak 1999 sampai dengan 2017. Tercatat telah ada 161 personel TNI belajar di China, sedangkan China yang belajar ke Indonesia dengan rentang waktu yang sama berjumlah 17 orang. Pelatihan pilot telah terlaksana dalam bentuk pelatihan simulator pesawat Sukhoi sejak tahun 2009. Adapun jenis pendidikan lainnya antara lain adalah *Defence and Strategic Course, PLA Army Command and Staf College, PLA Air Force Command and Staff College dan PLA Navy and Staff College.*

Latihan antara kedua Pasukan Khusus. Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus didampingi Kepala Staf Militer Zilan China, Letjen Gen Zhao Zonggi, membuka upacara latihan bersama (Latma) antara Kopassus kedua negara. Dan diberi nama *Sharp Knife* di Batu Jajar pada 18 Juni 2011. Latma Sharp Knife Kopassus – PLA *Special Force* kedua di Pangkalan Latihan Terpadu Jinan - China tanggal 1 - 16 Juli 2012.

Konsultasi bilateral kedua negara sudah melaksanakan konsultasi tahunan ke-5 di Beijing bulan Januari 2013. Hasil pertemuan membahas tentang Laut China Selatan, kerja sama maritim RI – RRC, kerja sama ASEAN – China dalam bidang keamanan dan program kerja sama yang disepakati antara lain saling kunjung untuk pejabat tinggi latihan bersama pada ketiga angkatan (Misal latihan *airborne*), latihan pasukan khusus dalam bentuk OJT.

Forum Dialog, seperti *Navy to Navy Talk* (NTNT), *Defence Industry Cooperation Meeting* (DICM), *Defence Engagement Coordination Talk* (DECT). Industri Pertahanan, pada saat ini RRC menjadi salah satu negara alternatif dalam rangka pengadaan Alutsista TNI baik Matra Darat, Laut dan Udara. Tidak hanya terbatas pada pengadaan suku cadang alutsista TNI, berbagai pengadaan senjata untuk kebutuhan TNI sampai saat ini masih dilaksanakan, antara lain rudal C-705, peluru kendali jarak pendek QW-3, serta simulator Sukhoi-27/30.

Kunjungan dan lain-lainnya, pada tanggal 18 sampai dengan 20 Februari 2011, Wamenhan berkunjung ke China, pada tanggal 21 Mei 2010 Menhan RI menerima kunjungan kehormatan *Vice Chairman Central Military Commission of the People's Republic of China*, pada tanggal 21 Maret 2011 Gen Ma Xiao berkunjung ke Kemhan RI, Kunjungan PM Wen Jiabao pada *ASEAN Summit* di Jakarta 7-8 Mei 2011 menunjukkan keinginan China untuk meningkatkan pengaruhnya dalam skema kerja sama multilateral di kawasan Asia Pasifik.

D. Kementerian Pertahanan Indonesia

Untuk meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas kawasan, perlu dilaksanakan upaya-upaya yakni Kementerian Pertahanan menyusun suatu agenda rencana aksi untuk meningkatkan kualitas SDM pertahanan di bidang diplomasi. Seperti penerapan manajemen modern. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi. Kementerian Pertahanan menyelenggarakan suatu jenjang pendidikan atau kursus yang diikuti oleh PNS terkait dan personel TNI yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertahanan di bidang diplomasi. Kementerian Pertahanan meningkatkan prasyarat dalam rekrutmen sumber daya manusia, khususnya Pegawai Negeri Sipil dan mengadakan peningkatan profesionalisme.

Kementerian Pertahanan menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertahanan negara lain guna untuk meningkatkan kualitas SDM pertahanan di bidang diplomasi lewat kegiatan pelatihan, kursus dan lain sebagainya. Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan mengirimkan personel-personel secara aktif untuk mengikuti berbagai forum regional dan international. Kementerian Pertahanan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan

kualitas sumber daya manusia pertahanan di bidang diplomasi. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI menyelenggarakan suatu kegiatan bersama secara rutin yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertahanan di bidang diplomasi.

Kementerian Pertahanan melakukan uji kompetensi secara rutin kepada personel Kementerian Pertahanan khususnya untuk menguji kecakapan mereka di bidang diplomasi. Kementerian Pertahanan menyusun silabus mengenai pendidikan, pelatihan dan kursus di bidang diplomasi pertahanan. Kementerian Pertahanan menyediakan suatu beasiswa khusus di bidang diplomasi pertahanan yang dapat dimanfaatkan oleh personel TNI dan PNS Kementerian Pertahanan untuk belajar diplomasi di perguruan tinggi terkemuka di dalam dan luar negeri. Kementerian Pertahanan membentuk suatu Pusat Pendidikan di lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan yang khususnya menangani tentang diplomasi pertahanan.

Kementrian Pertahanan, Mabes TNI dan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia meningkatkan pola dan metode kerja sama. Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas memastikan tersedianya alokasi dana bagi modernisasi kekuatan sesuai dengan 15 MEF. Dengan berpedoman pada kebijakan tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan dan pengembangan kemampuan pertahanan negara. Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memodernisasi alutsista pertahanan, baik melalui kegiatan pembelian alutsista, lisensi, imbal-beli, *co-production* maupun *offset*. (Salim, 2012)